

**PENERAPAN TEKNOLOGI BLOCKHAIN UNTUK MENINGKATKAN
EFISIENSI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL**

Oleh:

BETRIS OKTARINI

ARISTA

NPM 2216041140



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

2023

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN	3
Latar Belakang.....	3
Rumusan Masalah.....	11
Tujuan penelitian	11
Manfaat penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	12
Penelitian Terdahulu	12
Tinjauan Teori Efektivitas.....	15
Inovasi teknologi	15
Faktor pengaruh inovasi teknologi	15
Penyaluran bantuan sosial	18
III. Metode Penelitian	21
Tipe Penelitian.....	21
Fokus Penelitian.....	21
Lokasi Penelitian.....	21
Teknik Pengumpulan Data	23
Teknik Keabsahan Data	25
Uji Keabsahan Data	26
IV. Hasil dan Pembahasan.....	28
Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	28
Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung	29
Hasil Penelitian Dan Pembahasan	30
V. Penutup.....	33
Kesimpulan.....	34
Saran.....	35
DAFTAR PUSTAKA	36

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Komponen kunci dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga-lembaganya yaitu dengan menciptakan pemerintahan yang efektif dan transparan. Pemerintahan suatu negara yang sukses yaitu dengan memprioritaskan pemenuhan kebutuhan rakyatnya, menyediakan layanan publik berkualitas tinggi, dan memastikan alokasi dana harian yang akurat. Namun seiring berjalannya waktu tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan keamanan dalam proses administrasi negara akan semakin meningkat. Salah satu peran pemerintah yang paling penting dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan di Indonesia adalah bantuan sosial. Baik pemerintah maupaun organisasi non-pemerintah dan lembaga amal biasanya menyediakan dana untuk kesejahteraan sosial guna membantu individu atau kelompok masyarakat yang membutuhkan.

Namun permasalahan utama yang sering muncul dalam pelaksanaan program kesejahteraan sosial adalah kurangnya transparansi dana penyaluran bantuan sosial dan akuntabilitas penggunaan dana tersebut. Problematika yang dihadapi dalam penyaluran bantuan sosial antara lain adalah proses penyaluran yang rumit, yang menjadi salah satu masalah utamanya adalah kompleksitas proses administratif yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial dimana transparansi dapat terganggu karena keterlambatan dan kerumitan. Proses penyaluran dikatakan rumit karena harus melewati beberapa langkah yang diperlukan dalam proses ini sehingga melibatkan banyak lembaga pemerintah yang berbeda. Permasalahan ini menimbulkan kesulitan bagi masyarakat, khususnya dalam hal distribusi bantuan sosial, merupakan isu yang memengaruhi banyak negara dan komunitas di seluruh dunia. Proses penyelenggaraan bantuan sosial yang dianggap rumit telah menjadi penyebab utama kecemasan dan kebingungan di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memahami faktor-faktor yang mengakibatkan kompleksitas dalam proses ini dan dampaknya terhadap masyarakat. Kita harus menyadari bahwa kompleksitas dalam penyaluran bantuan sosial bukanlah masalah yang berdiri sendiri. Ini seringkali disebabkan oleh sejumlah faktor yang terhubung satu sama lain. Salah satu faktor utama adalah birokrasi yang terlibat dalam proses ini.

Birokrasi pemerintah atau organisasi yang mengelola bantuan sosial sering melibatkan prosedur panjang dan rumit yang membutuhkan banyak dokumen, persetujuan,

dan verifikasi. Hal ini dapat menghambat aliran bantuan kepada penerima yang membutuhkannya. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan sosial juga menjadi kendala. Ketidakjelasan dalam pemantauan dan pelaporan penggunaan dana bantuan dapat menciptakan ketidakpercayaan dalam masyarakat. Ketika orang merasa tidak yakin mengenai cara dana bantuan mereka digunakan atau apakah bantuan tersebut benar-benar sampai kepada penerima yang seharusnya, ini dapat menimbulkan rasa cemas dan ketidakpuasan. Kompleksitas juga muncul dari peraturan dan persyaratan yang berbeda di setiap tingkat pemerintahan atau organisasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial. Setiap entitas mungkin memiliki aturan dan regulasi sendiri, yang menjadikan proses semakin rumit. Penerima bantuan sering harus menghadapi tumpang tindih dalam persyaratan atau bahkan perbedaan dalam kriteria kelayakan di berbagai wilayah. Masalah teknis juga dapat menjadi penyebab rumitnya proses penyaluran bantuan sosial. Sistem yang digunakan untuk melacak dan mendistribusikan bantuan dapat menjadi rumit dan rentan terhadap kegagalan teknis. Ini dapat mengakibatkan penundaan dalam penyaluran bantuan dan meningkatkan frustrasi di kalangan penerima yang sudah berjuang dengan situasi sulit.

Dampak dari proses penyaluran bantuan sosial yang rumit dan kurang efisien sangat berdampak pada masyarakat. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya ketidaksetaraan sosial. Ketika bantuan tidak disalurkan dengan tepat waktu dan efektif kepada mereka yang membutuhkan, kelompok yang sudah terpinggirkan dalam masyarakat dapat semakin terpinggirkan. Ini dapat memperburuk masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Ketidakpastian dalam penyaluran bantuan sosial juga dapat menciptakan tekanan psikologis pada masyarakat. Masyarakat yang hidup dalam ketidakpastian mengenai masa depan mereka dan menghadapi kesulitan ekonomi sering mengalami tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan fisik mereka. Selain itu, ketidakpuasan terhadap proses penyaluran bantuan sosial dapat mengganggu stabilitas sosial. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan pada pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab atas penyaluran bantuan, hal ini dapat menciptakan ketegangan sosial dan aksi protes.

Ketidakpuasan ini juga berpotensi merambat menjadi ketidakstabilan politik. Pemerintah harus berupaya untuk menyederhanakan proses penyaluran bantuan sosial, meningkatkan transparansi, dan memastikan akuntabilitas. Ini dapat melibatkan pembaruan regulasi, investasi dalam teknologi yang lebih efisien, dan pelatihan yang lebih baik bagi staf yang terlibat dalam penyaluran bantuan. Selain itu, masyarakat juga harus aktif terlibat dalam memantau dan memberikan umpan balik terkait proses penyaluran bantuan sosial, sehingga perbaikan dapat terus dilakukan. Masalah kompleksitas dalam proses penyaluran bantuan sosial adalah permasalahan yang memengaruhi masyarakat dan memiliki dampak yang signifikan. Untuk mengatasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah, organisasi nirlaba, dan masyarakat. Hanya dengan upaya bersama, kita dapat menjalankan proses penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan memberikan bantuan yang lebih baik kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini juga karena kurangnya koordinasi antar instansi dapat mengakibatkan ketidakjelasan mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing, yang pada akhirnya mempengaruhi transparansi pada proses penyaluran dana bantuan sosial. Kurangnya transparansi dalam konteks penyaluran bantuan sosial berarti bahwa prosedur atau sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam menyalurkan bantuan sosial kepada penerima tidak dilakukan secara jelas dan terbuka. Hal ini menghambat akses terhadap informasi yang dibutuhkan untuk memahami bagaimana dana bantuan tersebut biasanya digunakan. Misalnya, sulit untuk memahami siapa penerima bantuan sosial, berapa banyak uang yang mereka peroleh, atau bagaimana mereka akan menggunakan donasi tersebut setelah donasi tersebut diberikan kepada mereka. Karena kurangnya transparansi, sulit bagi pihak yang berkepentingan, seperti masyarakat umum atau badan pemerintahan, untuk menilai dan memverifikasi bahwa bantuan sosial memang diperlukan dan digunakan secara tepat oleh mereka yang menerima. Selain itu, ketidaktransparan ini meningkatkan risiko data yang ada mengalami kehilangan. Orang lain atau oknum yang tidak berwenang dapat mengambil alih data orang lain untuk menggunakan kesempatan ini dan melakukan kejahatan yang tidak sesuai hukum yang berlaku.

Pemerintah seringkali tidak mempunyai data yang akurat dan terkini padahal data yang akurat dan terkini sangat penting dalam pengalokasian dana program kesejahteraan sosial secara akurat, maka pemerintah harus memiliki informasi tersebut. Informasi tentang pentingnya data yang akurat dan masalah yang mungkin timbul jika data tidak lengkap atau tidak akurat akan menimbulkan masalah baru.

Data yang benar dan akurat ini memungkinkan pemerintah mengidentifikasi secara akurat siapa saja yang membutuhkan dan layak untuk mendapatkan bantuan sosial. Hal ini memastikan bantuan sosial itu valid diberikan kepada mereka atau kelompok yang benar - benar membutuhkannya sekaligus mencegah bantuan salah sasaran ke orang lain yang tidak membutuhkannya. Data yang akurat adalah data yang bisa membantu pemerintah melaksanakan pengalokasian sumber daya secara efisien, mencegah penyalahgunaan sumber daya yang ada, dan memastikan penggunaannya sebagaimana mestinya. membantu pemerintah melaksanakan pengalokasian sumber daya secara efisien, mencegah penyalahgunaan dana, dan pengalokasian yang tepat sasaran. Penyaluran bantuan sosial yang kurang akurat dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk keadilan Sosial yang tidak terealisasi. Ketidaktepatan dalam pemberian bantuan sosial dapat mengakibatkan ketidakadilan sosial karena mereka yang sebenarnya membutuhkan bantuan bisa saja tidak mendapatkannya, sementara yang seharusnya tidak memenuhi syarat justru menerima bantuan. Kurang tepatnya alokasi bantuan dapat mengakibatkan pemborosan dana publik, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membantu yang memerlukan dapat terbuang secara tidak efisien. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan bisa merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan program-program sosial. Masyarakat mungkin merasa bahwa uang mereka tidak digunakan dengan baik. Jika bantuan sosial tidak tepat sasaran, maka individu yang seharusnya mendapat kesempatan untuk meningkatkan situasi ekonomi mereka bisa terus berjuang dalam kemiskinan, sementara yang seharusnya tidak mendapatkan bantuan justru menerima lebih banyak. Ketidaktepatan dalam penyaluran bantuan sosial dapat membuka peluang bagi kecurangan, baik dari pihak penerima maupun penyelenggara program, yang dapat merugikan sistem secara keseluruhan. Bantuan yang tidak sesuai sasaran dapat mengurangi efektivitas program bantuan sosial dalam mencapai tujuan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Masalah yang sering terjadi lainnya adalah penyalahgunaan program bantuan sosial dimana ini adalah permasalahan yang sangat serius dan memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap stabilitas sosial suatu negara. Ketika program-program ini tidak dijalankan dengan benar dan tidak adil, maka masyarakat yang pada dasarnya seharusnya mendapatkan manfaat dari bantuan tersebut bisa merasa terpinggirkan, dan hasilnya adalah meningkatnya tingkat ketidakpuasan. Sangat penting untuk memahami bahwa program-program bantuan sosial seharusnya memiliki tujuan utama, yaitu memberikan bantuan kepada mereka yang memerlukan dalam masyarakat. Sasarannya adalah mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan sosial, dan mengurangi ketidaksetaraan ekonomi. Namun, ketika program-program tersebut disalahgunakan atau

tidak dikelola dengan baik, maka dampak negatifnya dapat meluas dan merasuki berbagai aspek kehidupan sosial. Salah satu dampak yang paling terlihat dari penyalahgunaan program bantuan sosial adalah munculnya ketidakadilan sosial. Bantuan yang semestinya diberikan kepada individu atau kelompok yang benar-benar membutuhkan bisa saja tidak sampai kepada mereka dengan benar. Sebaliknya, ada kemungkinan bahwa orang-orang yang seharusnya tidak memenuhi syarat atau yang kurang membutuhkan justru menerima bantuan tersebut. Situasi semacam ini menciptakan ketidakadilan sosial yang nyata. Masalah ini tidak hanya berkisar pada aspek statistik, melainkan juga mengandung dimensi etis yang bisa memicu rasa ketidakpuasan yang tinggi di kalangan warga negara. Ketidakpuasan yang muncul, jika tidak ditangani dengan baik, bisa berkembang menjadi protes sosial yang kuat. Ketika masyarakat mulai merasa bahwa pemerintah tidak bersikap adil dalam mendistribusikan bantuan, mereka cenderung bersatu untuk mengungkapkan ketidakpuasan mereka. Demonstrasi jalanan, mogok, dan aksi protes menjadi bentuk-bentuk ekspresi yang seringkali muncul dalam konteks seperti ini. Media sosial dan teknologi modern yang memungkinkan pesan ketidakpuasan menyebar dengan cepat, mendorong munculnya gerakan-gerakan yang lebih besar dan lebih efektif. Ketegangan sosial juga muncul sebagai dampak dari penyalahgunaan program bantuan sosial. Ketika masyarakat merasa terpinggirkan akibat ketidakadilan dan tidak puas dengan kinerja pemerintah, hubungan antarindividu serta antarkelompok dalam masyarakat bisa menjadi tegang. Ketegangan ini dapat menciptakan perpecahan yang lebih dalam antara kelompok sosial, etnis, atau agama. Ini berpotensi memicu konflik internal yang mengancam stabilitas sosial. Yang lebih serius lagi, penyalahgunaan program bantuan sosial bisa berujung pada kerusuhan sosial. Ketika tingkat ketidakpuasan mencapai puncaknya dan ketegangan mencapai titik tertentu yang tidak dapat ditoleransi, maka masyarakat bisa melampiaskan kemarahan mereka melalui tindakan kekerasan. Kerusuhan sosial dapat mengancam nyawa dan harta benda, dan juga dapat mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan. Kasus-kasus sejarah di berbagai negara menunjukkan betapa merusaknya dampak dari kerusuhan sosial. Selain dampak langsung yang dapat memicu kerusuhan sosial, penyalahgunaan program bantuan sosial juga bisa mengikis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepercayaan merupakan dasar dari hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyatnya. Ketika warga merasa bahwa pemerintah tidak dapat diandalkan atau tidak adil dalam menjalankan program-program bantuan sosial, hal ini bisa merusak dasar kepercayaan tersebut. Kerusakan dalam kepercayaan ini dapat berdampak jangka panjang terhadap hubungan antara pemerintah dan rakyat, dan pemulihannya mungkin menjadi tugas yang sangat sulit. Dampak lain yang harus

diperhatikan adalah ketidakpastian ekonomi. Jika bantuan tidak tersalurkan dengan benar, maka individu dan keluarga yang seharusnya mendapatkan dukungan ekonomi dapat terus merasakan penderitaan. Hal ini dapat menghambat kemajuan ekonomi mereka dan memperlebar kesenjangan ekonomi dalam masyarakat. Ketidakpastian ekonomi ini dapat menimbulkan tekanan tambahan pada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Selain itu, penyalahgunaan program bantuan sosial membuka peluang luas untuk terjadinya kecurangan dan penipuan. Baik penerima bantuan maupun petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program bisa tergoda untuk memanfaatkan situasi ini demi keuntungan pribadi. Ini tidak hanya merugikan dana publik, tetapi juga dapat merusak integritas program-program tersebut. Penyalahgunaan program bantuan sosial dapat mengurangi efektivitas program tersebut. Program-program ini dirancang untuk mencapai tujuan tertentu, seperti mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketika bantuan tidak disalurkan dengan benar, program tersebut menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini berarti upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat mungkin akan gagal mencapai hasil yang diharapkan, sehingga uang pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak akan memberikan manfaat sesuai yang diharapkan.

Keterbukaan dalam penggunaan dana sosial juga termasuk hal yang sangat penting dalam konteks penyaluran bantuan ke masyarakat. Ini mencerminkan dalam sejauh mana dana yang dialokasikan oleh pemerintah atau lembaga amal digunakan dengan benar dan efisien untuk membantu mereka yang membutuhkan. Sayangnya, masalah terkait dengan kurangnya transparansi dana sering kali menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program bantuan sosial dan dampaknya yang positif. Sebelum kita melanjutkan, perlu dipahami bahwa transparansi dana mengacu pada tingkat keterbukaan dan kejelasan informasi terkait dengan sumber daya finansial yang diterima, dialokasikan, dan digunakan dalam rangka program bantuan sosial. Ini mencakup pengungkapan tentang dana yang disediakan oleh pemerintah, sumbangan dari individu atau organisasi swasta, serta rincian tentang bagaimana dana tersebut digunakan untuk berbagai tujuan seperti bantuan makanan, pendidikan, perumahan, dan layanan kesehatan. Ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial memiliki dampak yang serius pada masyarakat. Salah satu konsekuensi utamanya adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau lembaga amal yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program tersebut. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi mengenai penggunaan dana, hal ini dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan. Masyarakat mungkin merasa bahwa dana tidak dikelola

dengan benar atau bahkan dicurangi oleh pihak yang terlibat dalam penyaluran dana. Dampak yang sangat merugikan adalah terkait dengan ketidakpercayaan ini, yang bisa berdampak jangka panjang. Masyarakat yang merasa bahwa dana bantuan tidak digunakan secara efisien dan adil mungkin akan meragukan program-program bantuan sosial tersebut. Mereka dapat merasa bahwa uang pajak yang mereka bayar tidak dimanfaatkan sebaik mungkin, yang pada gilirannya dapat mengurangi dukungan publik terhadap program-program tersebut. Konsekuensinya, program-program tersebut mungkin tidak mencapai tujuan mereka dengan efektif, seperti mengurangi kemiskinan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial menciptakan peluang untuk penyalahgunaan dana. Ketika tidak ada pengawasan yang memadai atau ketika informasi tentang penggunaan dana tidak tersedia untuk umum, ada risiko munculnya tindakan penipuan, korupsi, atau alokasi dana yang tidak efisien. Ini merupakan masalah yang sangat serius, karena dana yang seharusnya digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan bisa terbuang percuma atau bahkan jatuh ke tangan yang salah. Selain itu, ketidaktransparan dalam penyaluran dana sosial juga dapat menghambat upaya pemantauan dan evaluasi program. Untuk mengukur efektivitas program bantuan sosial, penting memiliki akses yang tepat waktu dan akurat terhadap data mengenai penggunaan dana dan dampaknya. Ketika data ini tidak transparan, sulit bagi pihak berwenang, peneliti, atau masyarakat umum untuk melakukan evaluasi yang obyektif dan efisien. Masalah transparansi dana juga bisa merugikan reputasi pemerintah atau lembaga amal yang terlibat dalam penyaluran dana sosial. Ketika masyarakat meragukan bagaimana dana dikelola, ini dapat merusak citra dan reputasi institusi tersebut. Ini juga dapat berdampak pada kemampuan mereka untuk mengumpulkan sumbangan atau dukungan tambahan dari pihak swasta atau individu yang ingin berkontribusi pada program-program tersebut. Selain itu, teknologi modern dapat digunakan untuk meningkatkan transparansi. Pemerintah juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial. Tanggung jawab besar diemban oleh pemerintah dalam menjalankan program bantuan sosial, yang harus dijalankan dengan efektif dan efisien. Salah satu aspek krusial yang harus dipertimbangkan adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi pelaksanaan program ini. Mengapa keterlibatan masyarakat menjadi begitu penting? Pertama-tama, masyarakat adalah penerima utama bantuan ini dan memiliki pemahaman mendalam tentang kebutuhan mereka sendiri. Dengan melibatkan mereka, pemerintah dapat memastikan bahwa bantuan disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang ada. Partisipasi masyarakat juga memberikan kontribusi positif terhadap transparansi program. Ketika masyarakat dapat memantau dan memberikan

masuk tentang pelaksanaan program, ini berperan dalam mencegah penyalahgunaan dana dan praktik-praktik yang tidak jujur. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, mengurangi ketidakpercayaan, dan mendorong dukungan masyarakat pada pemerintah. Sangat penting memiliki mekanisme yang tepat untuk mengelola partisipasi masyarakat ini. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap umpan balik dan masukan yang diberikan oleh masyarakat dihargai dan diambil tindakan yang sesuai dengannya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial merupakan langkah esensial menuju kesuksesan program ini. Hal ini tidak hanya memastikan bahwa bantuan benar-benar mencapai yang membutuhkan, tetapi juga berdampak positif pada transparansi, kepercayaan, dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan. Pemerintah dan lembaga amal harus membuka pintu untuk menerima masukan dari warga negara dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik yang diberikan. Pihak berwenang juga harus mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam pemantauan program bantuan sosial. Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pemantauan program dapat meningkatkan akuntabilitas dan membangun kepercayaan. Pemerintah dan lembaga amal harus membuka pintu untuk menerima masukan dari warga negara dan mengambil tindakan yang sesuai berdasarkan umpan balik yang diberikan. Dalam rangka mencapai efektivitas dan integritas program bantuan sosial yang lebih baik, perlu ditekankan bahwa peningkatan transparansi dana merupakan langkah yang sangat penting. Dengan demikian, dana sosial dapat digunakan dengan lebih efisien dan adil untuk membantu mereka yang membutuhkan, sementara juga membangun kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan program-program tersebut. Platform online atau aplikasi dapat digunakan untuk melacak dan melaporkan penggunaan dana secara real-time. Ini memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk memahami bagaimana dana digunakan dan untuk memantau program-program tersebut.

Alhasil, pengembangan teknologi blockchain menjadi semakin penting dan memiliki manfaat dalam upaya meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam penyaluran dana untuk tujuan sosial. Inovasi terbaru, yang dikenal sebagai teknologi Blockchain. Blockchain adalah sistem distribusi data yang terdesentralisasi dan aman, yang mencatat transaksi secara transparan dengan menghubungkan blok-blok data yang berisi informasi transaksi yang tidak dapat diubah. Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi bagaimana penerapan teknologi

blockchain dapat memberikan manfaat dalam meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial. menawarkan potensi signifikan untuk meningkatkan cara suatu negara menjalankan program pemerintahannya. Dengan menggunakan teknologi digital yang memungkinkan penciptaan dan perluasan kontrak digital untuk mencatat transaksi secara aman, terdesentralisasi, transparan, dan aman. Teknologi yang dimaksud pada awalnya dikenal sebagai infrastruktur mata uang digital seperti Bitcoin, namun kini memiliki potensi yang jauh lebih besar di berbagai bidang, termasuk Administrasi Negara.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat memperbaiki efisiensi proses penyaluran bantuan sosial?
2. Apa saja hambatan yang akan muncul ketika menerapkan teknologi blockchain dalam konteks penyaluran bantuan sosial?
3. Bagaimana dampak penggunaan blockchain memengaruhi keterbukaan, transparansi, keamanan, dan ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial?

1.2 Tujuan Penelitian

1. Tujuan utama penelitian ini adalah mengevaluasi efektivitas dan potensi penerapan teknologi blockchain dapat efektif dalam meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial
2. Menganalisis hambatan-hambatan yang mungkin muncul saat menerapkan teknologi blockchain dalam konteks bantuan sosial.
3. Mengidentifikasi dampak positif yang dihasilkan oleh penggunaan teknologi blockchain terhadap keterbukaan, keamanan, serta ketepatan data dalam penyaluran bantuan sosial.

Manfaat Penelitian:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan kepada pemerintah, lembaga sosial, dan organisasi yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial untuk memahami potensi teknologi blockchain dalam meningkatkan efisiensi proses ini.

2.Mengidentifikasi potensi masalah yang dapat muncul selama implementasi blockchain, dengan demikian membantu dalam menghindari atau mengatasi hambatan yang mungkin timbul.

3.Meningkatkan transparansi dan keamanan dalam penyaluran bantuan sosial, yang dapat menghasilkan manfaat bagi para penerima bantuan dan organisasi yang terlibat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Penelitian ini diteliti oleh Wasriyono, Dwi Apriliasari, dan Bayu Ajie Putra Seno yang berjudul Inovasi pemanfaatan blockchain dalam meningkatkan keamanan kekayaan intelektual pendidikan dimana hasil penelitiannya menunjukkan terdapat beberapa metode untuk memanfaatkan teknologi Blockchain dalam membangun berbagai aplikasi pencatatan yang dapat diandalkan dan tidak dapat dimodifikasi. Penggunaan yang semakin sering dari teknologi ini mencerminkan pertumbuhan yang cepat dalam popularitasnya dan permintaan akan penggunaannya dalam mengatasi tantangan tradisional di dunia teknologi. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan sebelumnya yang menunjukkan bahwa teknologi Blockchain, yang memiliki ciri keamanan, transparansi, dan distribusi data, memiliki banyak potensi manfaat, termasuk penggunaannya dalam merampingkan operasi universitas dan mengatasi pemalsuan dokumen resmi universitas seperti transkrip. Penggunaan teknologi blockchain dalam sektor pendidikan memiliki dampak yang substansial dan beragam. Salah satu implikasi yang krusial adalah kemampuannya untuk meningkatkan keamanan serta keandalan data siswa. Melalui teknologi blockchain, data pendidikan seperti catatan akademik, transkrip, dan sertifikat dapat tersimpan dalam rantai blok yang tak dapat dimanipulasi, memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dan mencegah upaya pemalsuan atau perubahan yang tidak sah. Ini akan memberikan keyakinan kepada berbagai pihak, termasuk institusi pendidikan dan pihak yang mengandalkan data pendidikan, bahwa informasi tersebut dapat dipercaya. Tidak hanya itu, teknologi blockchain juga memudahkan manajemen identitas digital siswa. Setiap siswa dapat memiliki identitas digital yang unik dan terverifikasi, digunakan untuk mengakses layanan pendidikan secara online dengan lebih aman dan efisien. Ini juga mendukung dalam proses penerimaan mahasiswa baru, di mana pihak berwenang dapat dengan mudah memverifikasi kualifikasi pendidikan seorang siswa tanpa harus bergantung pada dokumen fisik yang dapat dipalsukan. Lebih lanjut, teknologi blockchain membuka peluang untuk mengubah cara pengakuan dan validasi kualifikasi pendidikan dilakukan. Sertifikat dan transkrip pendidikan yang diperkuat oleh teknologi blockchain dapat dengan mudah diverifikasi oleh pihak pemberi kerja atau institusi lainnya, menghilangkan kerumitan dan birokrasi dalam proses tersebut. Ini memberikan manfaat yang

signifikan bagi lulusan yang mencari pekerjaan atau melanjutkan pendidikan mereka, serta untuk pengusaha yang membutuhkan tenaga kerja berkualitas. Tidak hanya manfaat saat ini, tetapi penelitian ini juga menggambarkan potensi pengembangan di masa depan dalam penerapan teknologi blockchain dalam sektor pendidikan. Sebagai contoh, dalam pengelolaan layanan perpustakaan digital, teknologi blockchain dapat digunakan untuk melacak dan mengelola akses ke sumber daya digital secara lebih efisien. Selain itu, dalam konteks pelacakan partisipasi siswa dan kehadiran dalam kursus online, teknologi ini dapat digunakan untuk menciptakan sistem yang lebih adil dan transparan. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang potensi teknologi blockchain dalam mengubah sektor pendidikan. Para pengambil kebijakan, institusi pendidikan tinggi, akademisi, manajer, dan peneliti diharapkan dapat memanfaatkan temuan ini sebagai landasan untuk mengembangkan inisiatif dan strategi yang lebih baik dalam mengintegrasikan teknologi blockchain dalam pendidikan. Ini akan membantu menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, efisien, dan inovatif demi keuntungan semua pihak yang terlibat dalam proses pendidikan.

Kemudian terdapat penelitian yang dilakukan oleh Khalida Urfiyya dan sulastiningsih, yang berjudul digital system blockhain sebagai strategi untuk optimalisasi pengelolaan dana zakat dimana hasil penelitiannya menunjukkan Implementasi aspek digital dalam ekonomi Islam membawa potensi yang sangat besar untuk menghadirkan perubahan positif dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas lembaga-lembaga yang beroperasi di dalamnya. Salah satu teknologi yang telah muncul sebagai alat yang sangat berpotensi dalam konteks ini adalah teknologi blockchain. Dengan mengadopsi blockchain sebagai inti sistem, sejumlah manfaat yang signifikan dapat diwujudkan, termasuk tingkat keamanan transaksi yang sangat tinggi, tingkat transparansi yang tak tertandingi, dan signifikansi pengurangan biaya operasional. Lebih dari itu, penggunaan blockchain juga memiliki potensi besar untuk mengurangi risiko korupsi, penipuan, dan kerugian lainnya yang mungkin terjadi dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Pentingnya implementasi teknologi blockchain dalam ekonomi Islam memerlukan pendekatan yang cermat dan menyeluruh. Salah satu langkah awal yang sangat penting adalah memperkenalkan konsep blockchain kepada para ulama Islam dan para pemangku kepentingan dalam komunitas Islam secara umum. Hal ini dilakukan agar mereka dapat memahami dasar-dasar konsep blockchain, memperoleh pengetahuan yang diperlukan, dan menilai teknologi ini dari perspektif Maqasid al-Shari'ah, yang merujuk pada tujuan-tujuan

moral dan hukum Islam. Pendekatan ini menjadi esensial untuk memastikan bahwa implementasi teknologi blockchain tidak hanya efisien dari segi teknis, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang dijunjung tinggi dalam Islam. Salah satu manfaat utama dari implementasi blockchain dalam ekonomi Islam adalah kemampuannya untuk mengatasi sejumlah masalah ekonomi negara, seperti pengentasan kemiskinan dan pencapaian keadilan sosial. Melalui penggunaan blockchain, data yang berkaitan dengan zakat dan amal dapat diakses secara global, memungkinkan pemerintah dan lembaga-lembaga zakat untuk melacak pengumpulan dan distribusi zakat dengan lebih efisien dan transparan. Teknologi ini akan memastikan bahwa dana zakat dan amal sampai kepada penerima yang benar-benar membutuhkan, yang merupakan aspek yang sangat penting dalam prinsip distribusi kekayaan dalam Islam. Indonesia, sebagai negara dengan potensi besar dalam sektor ekonomi Islam, memiliki peluang unik untuk mengadopsi teknologi blockchain ini. Namun, untuk memaksimalkan manfaatnya, diperlukan pedoman dan aturan yang jelas, baik di tingkat lokal, regional, maupun internasional. Ini akan membantu dalam mengoptimalkan penerapan blockchain dalam berbagai aspek ekonomi Islam, termasuk dalam pengembangan dompet digital yang mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, selain regulasi, para cendekiawan dan pemimpin Islam perlu bekerja sama untuk mengembangkan strategi yang komprehensif terkait dengan penerapan blockchain dalam ekonomi Islam. Salah satu aspek teknis yang penting adalah pengembangan smart contract yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ini akan memungkinkan penggunaan blockchain dalam lembaga zakat dan lembaga keuangan Islam lainnya. Dalam upaya untuk mendorong praktik ini, beberapa langkah dapat dilakukan. Pertama, perlu peningkatan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lembaga zakat dan lembaga keuangan Islam untuk memastikan pemahaman yang baik dan penerapan efektif dari teknologi blockchain. Kedua, kesadaran tentang zakat dan konsep digitalisasi zakat perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam ekosistem blockchain ini secara sukarela. Ketiga, kerjasama yang terintegrasi antara Organisasi Pengelolaan Zakat (OPZ) di berbagai wilayah di Indonesia dapat memperkuat ekosistem blockchain dalam konteks zakat. Terakhir, kerjasama dengan berbagai platform digital dapat membantu mengintegrasikan solusi blockchain dengan aplikasi praktis dalam ekonomi Islam.

2.2 Kajian teoritis

Kajian teoritis merupakan langkah kunci dalam proses penelitian. Ini melibatkan peninjauan dan analisis dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian untuk memahami landasan teoritisnya, kajian teoritis membantu peneliti untuk mengidentifikasi area-area pengetahuan yang belum terpenuhi, membentuk kerangka kerja yang sesuai, kajian teoritis berperan sebagai dasar kuat yang mendukung penelitian yang berkualitas.

2.2.1 Teori inovasi teknologi

Teori Inovasi Teknologi, khususnya Teori Diffusion of Innovations yang dikembangkan oleh Everett Rogers, adalah kerangka konseptual yang mendukung pemahaman tentang cara teknologi baru, seperti blockchain, diterima dan digunakan dalam konteks penyelenggaraan bantuan sosial. Dalam teori ini, terdapat lima tahap adopsi, mulai dari pendahulu yang pertama kali mencoba teknologi baru hingga kelompok penolak yang sangat enggan. Faktor-faktor yang memengaruhi adopsi, seperti persepsi tentang keuntungan relatif, kesesuaian, keterlihatan, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas, juga diidentifikasi. Teori ini dapat membantu memahami bagaimana proses adopsi teknologi ini berkembang dari tahap awal hingga adopsi yang lebih luas. Hal ini mencakup peran innovators yang pertama kali mencoba blockchain, early adopters yang mempromosikannya, dan faktor-faktor seperti keuntungan relatif, kemudahan penggunaan, dan kompatibilitas yang mempengaruhi adopsi blockchain oleh para pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan bantuan sosial.

2.2.2 Faktor pengaruh inovasi teknologi

Faktor-faktor Pengaruh merupakan elemen krusial dalam Teori Inovasi Teknologi yang memegang peran sentral dalam memengaruhi keputusan individu maupun organisasi dalam menerima teknologi yang baru. Dalam konteks adopsi inovasi, faktor-faktor ini memainkan peran yang sangat penting. Faktor faktor yang mempengaruhi :

1.Keuntungan Relatif: Faktor ini merujuk pada persepsi individu atau organisasi terkait dengan keuntungan yang ditawarkan oleh inovasi bila dibandingkan dengan kondisi yang sudah ada atau alternatif yang telah ada sebelumnya. Apabila inovasi dianggap memberikan manfaat yang signifikan dan jelas, maka kemungkinan adopsi akan semakin tinggi. Sebagai contoh, jika pengguna merasa bahwa penerapan teknologi blockchain dalam penyaluran

bantuan sosial akan mengurangi birokrasi serta risiko penipuan, maka kemungkinan besar mereka akan lebih cenderung menerima teknologi ini.

2. Kesesuaian: Faktor ini mengevaluasi sejauh mana inovasi ini sesuai dengan nilai-nilai, kebutuhan, dan pengalaman individu atau organisasi. Apabila inovasi mendukung atau sejalan dengan nilai-nilai yang dianut oleh pengguna, maka peluang adopsi akan lebih tinggi. Sebagai contoh, jika pemerintah setempat di Kota Bandar Lampung mengutamakan transparansi dalam program bantuan sosial, maka penerapan blockchain yang mempromosikan transparansi akan lebih relevan.

3. Kemudahan Penggunaan: Faktor ini menilai sejauh mana inovasi dianggap mudah digunakan oleh individu atau organisasi. Semakin mudah penggunaan inovasi ini, semakin besar kemungkinan adopsinya. Sebagai contoh, jika teknologi blockchain disajikan dengan antarmuka yang simpel dan intuitif, maka individu cenderung akan lebih terbuka untuk menggunakannya.

4. Kompatibilitas: Kompatibilitas mengukur sejauh mana inovasi ini dapat berintegrasi dengan sistem atau praktik yang sudah ada. Jika inovasi ini dapat diintegrasikan tanpa mengganggu operasi yang sudah ada, maka adopsinya akan lebih mudah. Dalam konteks penerapan blockchain dalam bantuan sosial, jika teknologi ini dapat berfungsi secara sinergis dengan sistem administrasi yang sudah ada, maka akan lebih mungkin diterima dengan baik.

2.3 Konsep dasar teknologi blockchain

Blockchain adalah sistem distribusi data yang terdesentralisasi dan aman, yang mencatat transaksi secara transparan dengan menghubungkan blok-blok data yang berisi informasi transaksi yang tidak dapat diubah. Cara kerja blockchain yaitu ketika seseorang melakukan transaksi, seperti mengirim mata uang kripto atau mencatat informasi, transaksi tersebut dikumpulkan bersama dengan transaksi lain dalam satu blok, kemudian blok tersebut dikirimkan ke dalam jaringan yang terdiri dari node-node yang berdiri sendiri. Node-node ini akan melakukan verifikasi atas transaksi-transaksi yang terdapat dalam blok untuk memastikan keabsahan mereka, setelah verifikasi selesai, node-node dalam jaringan mencapai kesepakatan mengenai validitas blok tersebut. Ini bisa dicapai melalui berbagai protokol konsensus, seperti Proof of Work (PoW) atau Proof of Stake (PoS). Jika blok dinyatakan sah, maka blok tersebut akan terhubung secara berurutan dengan blok yang ada

sebelumnya, menciptakan suatu rantai blok. Inilah alasan mengapa disebut blockchain. Rantai blok merupakan suatu struktur data yang terdiri dari berbagai blok lain yang saling berhubungan satu sama lain. Setiap blok berisi informasi jumlah transaksi yang telah divalidasi, yaitu mencakup blok dari sebelumnya. Hasil akhirnya adalah struktur data yang sangat aman karena mengubah satu blok berarti mengubah setiap blok lain di bawahnya. Transaksi Blockchain dilakukan secara terdesentralisasi karena setiap node dalam jaringan memiliki akses ke seluruh konten dari setiap buku besar blockchain. Tidak hanya ada satu kantor yang mengendalikan atau menangani buku besar ini. Setiap transaksi harus diverifikasi keabsahannya oleh banyak orang _node yang mandiri sebelum dianggap valid. Hal ini menciptakan tingkat kepercayaan dan keamanan yang tinggi dalam jaringan blockchain. Karakteristik Utama dalam Blockchain yaitu ketahanan terhadap perubahan data dimana informasi dalam blockchain bersifat tetap dan tidak dapat dimodifikasi tanpa persetujuan mayoritas dalam jaringan. Ini menjamin keutuhan data. Informasi dalam blockchain bersifat immutable (tidak dapat diubah) dan memerlukan persetujuan mayoritas dari anggota jaringan untuk mengubahnya. Fitur ini menjaga integritas data secara aman, memastikan bahwa sejarah transaksi dan catatan tidak dapat dimanipulasi oleh entitas yang tidak sah. Dalam blockchain, setiap perubahan harus mendapatkan persetujuan dari sebagian besar node dalam jaringan, yang memerlukan konsensus. Oleh karena itu, informasi yang terdapat dalam blockchain dapat diandalkan dan dipercayai oleh semua pihak yang terlibat. Ini menjadikan blockchain ideal untuk berbagai aplikasi di mana keamanan dan ketahanan terhadap perubahan data menjadi krusial, seperti dalam penyimpanan catatan transaksi keuangan atau data penting lainnya. Transparansi Ledger blockchain terbuka untuk umum yang dapat dijangkau oleh siapa saja. Setiap transaksi, tanpa pengecualian, terekam dalam urutan blok yang terhubung. Ini berarti bahwa semua individu, tanpa kendala, dapat memeriksa dan memvalidasi catatan lengkap transaksi dengan mengakses rantai blok. Karakteristik transparansi ini menjadikan teknologi blockchain sebagai alat yang memfasilitasi pengawasan bersama dan menjamin transparansi dalam pemanfaatan data. Di dunia yang semakin menghargai integritas dan akuntabilitas, kemampuan ini menjadi unsur utama dalam berbagai aplikasi blockchain, termasuk analisis transaksi keuangan, pemantauan rantai pasokan, serta beragam penggunaan lainnya yang menekankan pentingnya transparansi dan aksesibilitas informasi. Tidak ada entitas pusat yang mengendalikan blockchain. Keputusan dalam jaringan biasanya disepakati melalui konsensus antara node-node yang terdesentralisasi. Dengan ciri-ciri ini, blockchain telah menjadi dasar bagi berbagai aplikasi,

termasuk mata uang kripto, kontrak pintar (smart contracts), dan banyak lagi, yang menonjolkan keamanan, keterbukaan, dan ketahanan terhadap perubahan data.

2.4 Penyaluran bantuan sosial di Indonesia

Penyaluran bantuan sosial adalah salah satu aspek penting dalam kebijakan pemerintah Indonesia. Dalam konteks ini, penyaluran yang efisien dan akurat menjadi tantangan utama. Penelitian sebelumnya oleh Inas sofia dan Ilham aji menyoroti berbagai isu yang muncul dalam penyaluran bantuan sosial di Indonesia dimana ketika pelaksanaan penyaluran bantuan sosial PKH (Program Keluarga Harapan) selama pandemi berlangsung, sejumlah masalah terkait dengan kesuksesan program tersebut muncul. Dalam lapangan, beberapa permasalahan mencakup perubahan status penerima bantuan, seperti relokasi tempat tinggal, kematian, putus sekolah, pernikahan dini, atau bahkan perceraian dengan pasangan. Perubahan-perubahan ini membuat kriteria penerima bantuan tidak lagi sesuai dengan situasi aktual, dan penyebab utamanya adalah ketidaksempurnaan pembaruan data secara berkala dalam basis data penerima PKH. Namun, yang lebih serius adalah adanya upaya pemalsuan data terkait dengan kriteria penerima bantuan yang dilakukan oleh pendamping sosial. Keberadaan penerima bantuan yang fiktif menjadi isu yang serius karena hal ini mengabaikan penerima bantuan yang sebenarnya dan mempengaruhi efektivitas keseluruhan program PKH. Lebih lanjut, pemalsuan data ini berpotensi mengakibatkan alokasi dana yang tidak sesuai sasaran. Dalam analisis yang komprehensif, dapat disimpulkan bahwa efektivitas distribusi dana PKH masih terpengaruh oleh berbagai kasus manipulasi data dan penyalahgunaan bantuan. Selain itu, terdapat risiko terjadinya praktik korupsi pada tahap penyaluran bantuan langsung tunai. Temuan yang diperoleh dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menunjukkan adanya potensi korupsi pada tahap ini, termasuk penggelapan dana, ketidaksesuaian jumlah dana yang disalurkan, serta praktik pungutan liar yang mungkin dilakukan oleh oknum penyalur dana. Terutama dalam konteks penyaluran bansos PKH, potensi korupsi menjadi perhatian serius karena dapat mengancam efisiensi dan efektivitas keseluruhan program tersebut.

2.5 Penerapan teknologi blockhain dalam penyaluran bantuan sosial

Studi terdahulu telah menguji penerapan teknologi blockhain dalam penyaluran dana bantuan sosial. Hasil penelitian nya menunjukkan potensi peningkatan efisiensi dan akurasi dalam proses penyaluran bantuan sosial. Teknologi Blockchain memberikan kemampuan untuk

meningkatkan upaya reformasi basis data dengan jaminan yang lebih kuat, kecepatan, dan akurasi yang tinggi. Pemerintah dapat dengan mudah mengadopsi teknologi ini dengan tujuan utama mengurangi kesalahan dalam penyaluran dana bantuan sosial dan mencapai beberapa tujuan lainnya, seperti mempercepat transformasi digital di Indonesia, mencegah korupsi, meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, mengintegrasikan data kemiskinan di Indonesia, meningkatkan keamanan dalam penyaluran dana bantuan sosial, serta mengurangi biaya operasional yang terkait. Penerapan teknologi Blockchain memberikan peluang besar untuk menyempurnakan sistem basis data dengan menawarkan tingkat keamanan, efisiensi, dan akurasi yang sangat tinggi. Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan yang mudah untuk mengadopsi teknologi ini dengan fokus utama pada pengurangan kesalahan dalam proses penyaluran bantuan sosial dan pencapaian sejumlah tujuan strategis lainnya. Salah satu manfaat terbesar adalah mempercepat proses transformasi digital di Indonesia. Melalui penggunaan blockchain, administrasi menjadi lebih efisien, memungkinkan pemerintah untuk mengikuti perkembangan teknologi dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Selain itu, blockchain juga mampu mengurangi risiko korupsi dengan tingkat transparansi yang tinggi. Setiap transaksi terekam dalam blockchain, sehingga menyulitkan pihak yang tidak sah untuk memanipulasi data atau menyalahgunakan dana. Peningkatan kepercayaan masyarakat merupakan dampak positif lainnya. Kemampuan untuk memverifikasi transaksi secara independen membuat masyarakat lebih percaya terhadap integritas program bantuan sosial. Selain itu, penggunaan teknologi ini juga meningkatkan tingkat keamanan dalam penyaluran dana bantuan sosial dan mengurangi biaya operasional yang terkait. Blockchain mengotomatisasi banyak prosedur, mengurangi peluang kesalahan manusia, dan menghemat biaya administratif.

2.6 Hipotesis penelitian

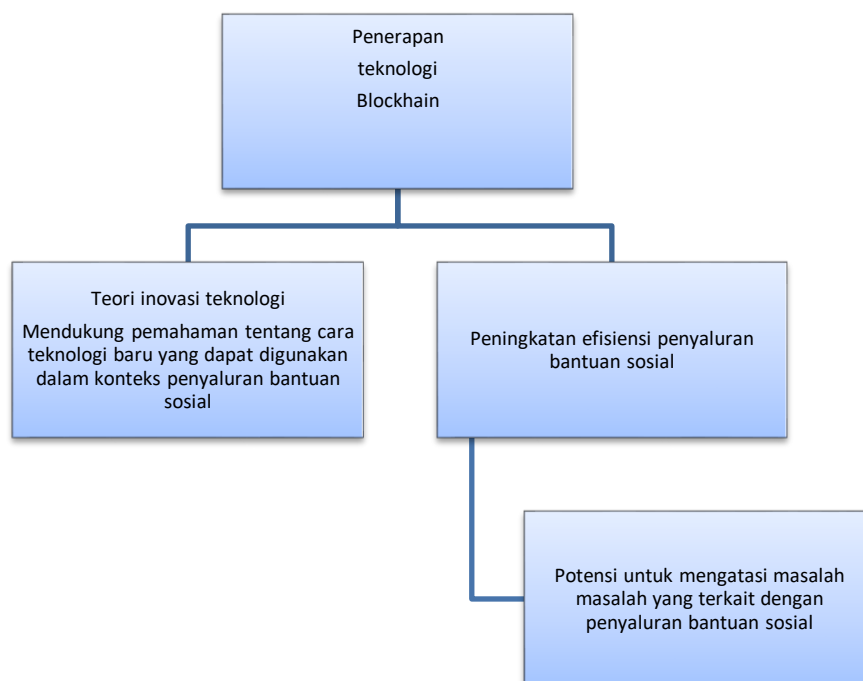
Hipotesis Utama

Penggunaan teknologi blockchain dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bandar Lampung memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan efisiensi proses penyaluran bantuan sosial.

Hipotesis Pendukung:

1. Penerapan teknologi blockchain akan meningkatkan tingkat transparansi dalam proses penyaluran bantuan sosial, mengurangi potensi penyalahgunaan, serta memfasilitasi peningkatan akuntabilitas.
2. Efisiensi yang dihasilkan oleh teknologi blockchain akan membantu mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan penyaluran bantuan sosial.
3. Penerima bantuan sosial akan mengalami peningkatan akses dan manfaat yang diterima berkat penerapan teknologi blockchain dalam proses penyaluran bantuan sosial

2.7 Kerangka berfikir



BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, Menurut Moleong (2017:6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Penelitian kualitatif menurut Hendryadi, et. al, (2019:218) merupakan proses penyelidikan naturalistik yang mencari pemahaman mendalam tentang fenomena sosial secara alami. Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas bukan kuantitas dan data-data yang dikumpulkan bukan berasal dari kuisioner melainkan berasal dari wawancara, observasi langsung dan dokumen resmi yang terkait lainnya. Penelitian kualitatif juga lebih mementingkan segi proses daripada hasil yang didapat. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas jika diamati dalam proses.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian bermanfaat bagi pembatasan mengenai objek penelitian yang diangkat manfaat lainnya adalah agar peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang di peroleh di lapangan.

Penelitian ini difokuskan meliputi:

1. Bagaimana Penerapan Teknologi Blockchain dapat meningkatkan efisensi penyaluran bantuan sosial
2. Hambatan yang muncul dalam menerapkan teknologi blockchain
3. Dampak penggunaan teknologi blockchain tersebut

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga

mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini berlokasi di kantor Dinas Sosial Bandar Lampung

3.4 Jenis dan Sumber Data

3.4.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu “data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung” (Hadi, 2015: 91). Sementara itu, (Muhadjir, 1998:29) menambahkan bahwa data kualitatif yaitu, “data yang disajikan dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka”. Jadi, data kualitatif adalah data yang hanya dapat diukur secara tidak langsung dan biasanya data dalam bentuk kata-kata verbal bukan dalam bentuk angka.

3.4.2 Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan sumber data dalam wujud data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data Primer ialah jenis dan sumber data penelitian yang di peroleh

secara langsung dari sumber pertama (tidak melalui perantara), baik individu maupun kelompok. Jadi data yang di dapatkan secara langsung. Data primer secara khusus di lakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penulis mengumpulkan data primer dengan metode survey dan juga metode observasi. Metode survey ialah metode yang pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Penulis melakukan wawancara kepada pemilik usaha woodshouse untuk mendapatkan data atau informasi yang di butuhkan. Kemudian penulis juga melakukan pengumpulan data dengan metode observasi. Metode observasi ialah metode pengumpulan data primer dengan melakukan pengamatan terhadap aktivitas dan kejadian tertentu yang terjadi.

2) Data Sekunder

Data Sekunder merupakan sumber data suatu penelitian yang di

peroleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara (di peroleh atau dicatat oleh pihak lain). Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

3.4.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu metode atau teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan noninteraktif. Data interaktif berarti ada kemungkinan terjadi saling mempengaruhi antara peneliti dengan sumber datanya. Teknik noninteraktif sama sekali tak ada pengaruh antara peneliti dengan sumber datanya, karena sumber data berupa benda, atau sumber datanya manusia atau yang lainnya (Sutopo, 2006:66). Teknik penelitian kualitatif pada dasarnya merupakan proses penyidikan, maksudnya kita dapat membuat pengertian fenomena sosial secara bertahap, kemudian melaksanakannya, sebagian besar dengan cara mempertentangkan, membandingkan, merepleksi, menyusun katalog, dan mengklasifikasi objek suatu kajian. Semua kegiatan itu merupakan penarikan sampel, untuk menemukan keseragaman dan sifat umum dunia sosial, dan kegiatan dilakukan terus dan berulang oleh peneliti lapangan kualitatif (Miles, 2007:47). Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, dan dokumentasi (Sugiyono, 2006:224). Dalam hal ini menggunakan Dokumentasi. Dokumen tertulis dan arsip merupakan sumber data yang sering memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif, terutama bila sasaran kajian mengarah pada latar belakang atau berbagai peristiwa yang terjadi di masa lampau yang sangat berkaitan dengan kondisi atau peristiwa masa kini yang sedang diteliti (Sutopo, 2006:80). Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

lain. Dokumen merupakan bahan kajian yang berupa tulisan, foto, film atau hal-hal yang dapat dijadikan sumber kajian selain melalui wawancara dan observasi dalam penelitian kualitatif. Menurut Guba and Lincoln (1981:235) dokumen digunakan untuk bahan penelitian sebagai sumber data karena dokumen merupakan sumber data yang stabil, kaya, dan mendorong. Sebagai bukti untuk suatu pengujian. Dokumen bersifat alamiah, sesuai dengan konteks, lahir dan berada dalam konteks. Dokumen tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan. Hasil kajian dokumen dapat digunakan untuk memperluas terhadap kajian yang sedang diteliti (Moleong, 2007:217). Dokumen-dokumen yang dikumpulkan oleh peneliti dipilih dan dipilah untuk diambil mana yang sesuai dengan fokus yang diteliti. Dokumen yang diambil dijadikan data pendukung penelitian. Agar hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dapat disajikan lebih valid dan lebih lengkap, sehingga paparan yang dihasilkan akan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai kajian yang kredibel dan ilmiah.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilaksanakan sebelum peneliti terjun ke lapangan, selama peneliti mengadakan penelitian di lapangan, sampai dengan pelaporan hasil penelitian. Analisis data dimulai sejak peneliti menentukan fokus penelitian sampai dengan pembuatan laporan penelitian selesai. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2007:224). Bogdan & Biklen mengatakan teknik analisis data adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2007:248).

3.7 Teknik Keabsahan Data

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, 2007:320). Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability (Sugiyono, 2007:270). Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan:

1. Credibility

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan.

-Triangulasi

William Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007:273).

1) Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data (Sugiyono, 2007:274).

-Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data

yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya (Sugiyono, 2007:275).

-Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan

data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya (Sugiyono, 2007:275).

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Sejarah Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan merupakan unsur yang melaksanakan tugas negara di bidang sosial, ketenagakerjaan, dan keimigrasian. Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan dipimpin oleh seorang manajer, kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati melalui Sekretaris Daerah. Departemen Sosial dan Tenaga Kerja mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan memberikan bantuan di bidang sosial dan ketenagakerjaan. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 menetapkan organisasi dan penyelenggaraan pelayanan sosial di Kotamadya Bandar Lampung Tingkat II serta mengubah bentuk dan fungsinya. Untuk melaksanakan tatanan daerah tersebut secara operasional, diatur rincian tugas masing-masing satuan struktural di lingkungan dinas sosial kotamadya daerah. Tahap II Bandar Lampung didasarkan pada Keputusan Walikota Bandar Lampung Tahap Kedua Nomor 19 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Tahap II. Lampung No. 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tingkat II Pemerintahan daerah sudah ada sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian digantikan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 32 Tahun 2004. Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tingkat II telah mengalami perubahan lebih lanjut berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Unit Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial.

4.1.2 Dasar Hukum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

- a. Dasar hukum pendirian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Keputusan Walikota Badar Lampung Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 11Februari 2008 tentang Tupoksi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.
- b. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandar Lampung dan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 19 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

4.1.3 Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah “terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat berdasarkan semangat keadilan sosial dalam masyarakat.”

b.Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat yang mempunyai permasalahan sosial.
2. Mengaktifkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi talenta kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatkan partisipasi dalam kegiatan kesejahteraan sosial setempat.
4. Pengarusutamaan gender dan penguatan kualitas hidup perempuan Kesejahteraan dan perlindungan anak.

4.1.4 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial

a. Kedudukan

Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang kesejahteraan sosial berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

c. Fungsi

Dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang kesejahteraan sosial
2. Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2 Hasil

Hasil penelitian menunjukkan mengenai bagaimana penerapan teknologi blockchain dapat memperbaiki efisiensi proses penyaluran bantuan sosial. Penggunaan teknologi blockchain akan membawa perubahan signifikan terhadap efisiensi proses distribusi pendukung pendapatan. Hal ini terutama terlihat pada peningkatan kecepatan pemrosesan dan pengurangan jumlah perantara yang berlebihan. Pertama, blockchain memungkinkan transaksi pembagian bantuan secara langsung antar pihak seperti pemerintah, lembaga sosial, dan penerima manfaat. Tidak diperlukan perantara untuk memperlambat proses. Ketika bantuan harus segera disalurkan, teknik ini sangat berguna. Selain itu, karena blockchain menyimpan semua transaksi dalam buku besar yang terdistribusi, tidak diperlukan proses manual yang rumit atau audit berulang. Informasi acara sudah tersedia dalam format digital yang mudah digunakan dan dikontrol. Hal ini mengurangi birokrasi dan waktu yang diperlukan untuk mendistribusikan bantuan pendapatan. Jika transaksi dapat diformalkan dengan cepat dan efisien, dukungan pendapatan akan lebih cepat menjangkau mereka yang membutuhkan. Hal ini sangat penting dalam situasi krisis atau ketika memberikan dukungan kepada kelompok rentan di masyarakat. Selain itu, mengurangi perantara juga dapat menghemat biaya operasional, sehingga lebih banyak uang dapat dialokasikan langsung kepada penerima manfaat. Dengan demikian, efisiensi proses penggunaan blockchain dalam pendistribusian bantuan sosial tidak hanya meningkatkan kecepatan, namun juga mengurangi kompleksitas dan biaya operasional, sehingga memberikan manfaat nyata bagi semua pihak yang terlibat dalam proses ini. Penerapan teknologi blockchain pada distribusi bantuan akan membawa perubahan besar dalam hal Transparansi dan Akuntabilitas. Blockchain adalah buku besar digital yang mencatat setiap transaksi dengan sangat detail. Setiap transaksi, termasuk transaksi terkait distribusi bantuan hidup, dicatat dalam blok terenkripsi yang terhubung secara kronologis. Hal ini menjadikannya alat yang sangat efektif untuk meningkatkan transparansi. Keuntungan utama dari sistem ini adalah informasi yang disimpan dalam blockchain bersifat terbuka dan tersedia untuk semua pihak yang berkepentingan. Penerima pendapatan dapat dengan mudah memeriksa transaksinya dan memastikan bahwa dana miliknya telah diterima dengan benar. Hal ini mengurangi kemungkinan kesalahan administratif dan penyalahgunaan dana.

4.3 Pembahasan

Salah satu aspek yang sangat penting dalam penelitian ini adalah peran kepercayaan masyarakat terhadap teknologi blockchain. Dalam proses penerapan blockchain untuk penyaluran bantuan sosial, kepercayaan adalah elemen kunci. Studi ini menyoroti bahwa masyarakat perlu memahami dan mempercayai sistem blockchain agar manfaatnya dapat dimaksimalkan. Hasil dari wawancara dan survei yang dilakukan menunjukkan bahwa seiring berjalannya waktu, tingkat kepercayaan dalam teknologi ini cenderung meningkat seiring dengan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerjanya. Faktor ini menciptakan landasan yang kuat untuk kesuksesan implementasi blockchain dalam upaya penyaluran bantuan sosial yang lebih efisien dan transparan. Masyarakat terlibat dalam hal ini. Selain itu, pihak berwenang, termasuk lembaga pemerintah yang terlibat dalam distribusi bantuan, dapat langsung mengakses data blockchain untuk memantau setiap langkah prosesnya. Hal ini menciptakan akuntabilitas yang tinggi karena setiap aktivitas dapat dipantau secara real time. Selain itu, masyarakat mempunyai akses terhadap informasi ini, sehingga menghasilkan transparansi yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam distribusi bantuan pendapatan. Dengan demikian, masyarakat dapat mengontrol dan memastikan bantuan pendapatan tersalurkan dengan baik dan dana tidak disalahgunakan. Dengan demikian, penggunaan teknologi blockchain tidak hanya akan mengubah cara bantuan penghidupan didistribusikan, namun juga menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan akuntabel. Hal ini memperkuat kepercayaan semua pihak yang terlibat dalam proses distribusi bantuan pendapatan dan membantu memastikan bahwa bantuan benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan. Penerapan teknologi blockchain dalam konteks pembagian bantuan sosial merupakan sebuah langkah perintis, namun juga memiliki beberapa kendala yang harus diatasi. Kurangnya pemahaman teknis mengenai teknologi blockchain oleh pihak-pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan pendapatan menjadi salah satu potensi kendala terbesar. Kebanyakan dari mereka mungkin belum familiar dengan konsep teknologi yang relatif baru dan kompleks. Pendidikan dan pelatihan tambahan sangat penting untuk mengatasi hambatan ini. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memperkenalkan konsep dasar blockchain, cara kerjanya dan manfaat yang dapat diberikan dalam konteks bantuan sosial. Hal ini juga harus mencakup pembelajaran langsung tentang penggunaan platform blockchain untuk sistem distribusi bantuan. Selain itu, pelatihan juga dapat membantu untuk memahami masalah keamanan blockchain. Stakeholder harus diberikan pemahaman bagaimana data yang tersimpan di blockchain dapat dilindungi agar tidak rentan terhadap serangan siber atau

kebocoran data pribadi. Pendekatan inklusif terhadap pendidikan sangatlah penting. Artinya semua pihak, termasuk pejabat publik, pekerja sosial bahkan penerima manfaat, mempunyai kesempatan yang sama untuk memahami dan menggunakan teknologi ini. Hal ini juga dapat membantu mengurangi perasaan cemas atau ketidakpastian yang mungkin timbul sehubungan dengan perubahan teknologi. Dalam konteks yang lebih luas, pelatihan ini tidak hanya sekedar investasi pada kapasitas individu, namun juga merupakan langkah penting untuk menjadikan distribusi bantuan pendapatan lebih efisien dan transparan. Dengan pemahaman teknis yang kuat tentang pemblokiran, para pihak akan lebih siap untuk berhasil mengadopsi teknologi ini dan memaksimalkan manfaatnya.

Penerapan teknologi blockchain untuk meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial memiliki dampak yang signifikan, sekaligus menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Dampak positifnya mencakup peningkatan transparansi dengan catatan transaksi yang tidak dapat diubah, menciptakan landasan yang kuat untuk akuntabilitas, dan mengurangi biaya administrasi serta birokrasi. Namun, tantangan muncul dalam bentuk kesiapan infrastruktur teknologi yang memadai, perlunya meningkatkan literasi teknologi di kalangan penerima bantuan, dan kompleksitas regulasi yang harus diatasi. Keamanan data dan masalah privasi menjadi fokus penting, sementara biaya awal implementasi, skala keterbatasan, dan ketergantungan pada teknologi juga menjadi faktor yang harus diperhitungkan. Meskipun tantangan ini hadir, penerapan blockchain dapat menjadi terobosan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran bantuan sosial dengan kondisi yang sesuai dan strategi yang tepat. Dalam jangka panjang, peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat terhadap teknologi ini juga diharapkan dapat mengatasi sebagian besar kendala.

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

penerapan teknologi blockchain berperan penting sebagai solusi inovatif dalam konteks penyaluran bantuan sosial di Kota Bandar Lampung. Potensi besar teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi proses dan transparansi cukup menjanjikan.

Pemahaman mendalam terhadap dampak hasil penelitian menjadi dasar penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang teridentifikasi. Hasil penelitian ini harus menjadi panduan bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil langkah yang tepat demi keberhasilan adopsi teknologi blockchain. Hal ini juga memerlukan kerja sama yang kuat antara pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat. Implementasi rekomendasi yang relevan merupakan tindakan nyata yang harus dilakukan. Pendidikan, investasi pada infrastruktur teknologi, dan perlindungan data merupakan langkah penting yang perlu diprioritaskan. Kolaborasi dengan perusahaan swasta yang berpengalaman dalam teknologi blockchain juga dapat membantu memastikan keberhasilan implementasi. Selain itu, penting untuk dipahami bahwa teknologi blockchain adalah alat yang ampuh yang tidak hanya dapat meningkatkan distribusi dukungan pendapatan, namun juga membawa perubahan positif yang signifikan terhadap pengelolaan dukungan pendapatan di masa depan. Hal ini merupakan langkah menuju pengelolaan bantuan pendapatan yang lebih adil, transparan dan efisien, yang pada akhirnya akan membawa lebih banyak manfaat bagi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa teknologi blockchain merupakan solusi cerdas dan strategis untuk mengatasi tantangan distribusi bantuan kehidupan.

5.2 Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, kami ingin memberikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut penerapan teknologi blockchain dalam penyaluran bantuan sosial di Kota Bandar Lampung:

Pengembangan Infrastruktur Blockchain: Pemerintah Kota Bandar Lampung dapat mempertimbangkan investasi dalam pengembangan infrastruktur blockchain yang lebih luas.

Ini melibatkan pelatihan personel, pengembangan perangkat lunak, dan kemitraan dengan penyedia teknologi.

Peningkatan Kesadaran dan Literasi: Penting untuk meningkatkan kesadaran dan literasi masyarakat terkait teknologi blockchain. Pihak berwenang dapat melaksanakan kampanye edukasi untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang manfaat teknologi ini.

Keamanan Data yang Berkelanjutan: Dalam jangka panjang, perlu diterapkan langkah-langkah keamanan data yang berkelanjutan untuk melindungi informasi pribadi penerima bantuan dan mencegah ancaman siber.

Evaluasi dan Perbaikan Terus-Menerus: Pemerintah dan lembaga sosial harus melakukan evaluasi reguler atas sistem blockchain yang ada. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk perbaikan berkelanjutan dalam penerapan teknologi.

Kerja Sama dengan Pihak Swasta: Kolaborasi dengan perusahaan teknologi blockchain dan sektor swasta lainnya dapat mempercepat inovasi dan pengembangan sistem.

DAFTAR PUSTAKA :

- Anufia, B., & Alhamid, T. (2019). Instrumen pengumpulan data.
- Apriliasari, D., & Seno, B. A. P. (2022). Inovasi Pemanfaatan Blockchain dalam Meningkatkan Keamanan Kekayaan Intelektual Pendidikan. *Jurnal MENTARI: Manajemen, Pendidikan dan Teknologi Informasi*, 1(1), 68-76.
- Argani, A., & Taraka, W. (2020). Pemanfaatan Teknologi Blockchain Untuk Mengoptimalkan Keamanan Sertifikat Pada Perguruan Tinggi. *ADI Bisnis Digit. Interdisiplin J*, 1(1), 10-21
- Augusta, M. O., Syeira, C. P. O., & Hadiapurwa, A. (2021). Penggunaan teknologi Blockchain dalam bidang pendidikan. *Produktif: Jurnal Ilmiah Pendidikan Teknologi Informasi*, 5(2), 437-442
- Caroline, E. (2019). Metode Kuantitatif. *Media Sahabat Cendekia*.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107.
- Latif, I. S., & Pangestu, I. A. (2022). Problematika Penyalahgunaan Bantuan Sosial Pada Masa Pandemi. *JUSTISI*, 8(2), 95-107
- Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., & Laksana, M. O. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3(2), 99-102.
- Maulani, I. E., Herdianto, T., Syawaludin, D. F., & Laksana, M. O. (2023). Penerapan Teknologi Blockchain Pada Sistem Keamanan Informasi. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 3(2), 99-102
- Muga, M. P. L., Kiak, N. T., & Maak, C. S. (2021). Dampak Penyalu...
- Rahmansyah, W., Qadri, R. A., Sakti, R. R. A., & Ikhsan, S. (2020). Pemetaan permasalahan penyaluran bantuan sosial untuk penanganan Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 2(1), 90-102
- Ridha, N. (2017). Proses penelitian, masalah, variabel dan paradigma penelitian. *Hikmah*, 14(1), 62-70

- Saran III, B. V. K. D. Bab III Metode Penelitian. Pengaruh Pendekatan Pembelajaran Scientific Approach Terhadap Peningkatan Hasil Belajar Ppkn Siswa Kelas Viii
- Suminar, L. R., & Nugroho, A. A. (2023). ADOPSI TEKNOLOGI BLOCKCHAIN DI SEKTOR PUBLIK: PELUANG PEMBENTUKAN SISTEM IDENTITAS DIGITAL NASIONAL DI ERA VUCA. *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(4/Januari).
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55-68.
- Wardhani, P. R., & Nasution, M. I. P. (2023). Peran Teknologi Blockchain dalam Keamanan dalam Privasi Data. *JKEM: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 3897-3905.
- Wati, H. (2016). Peran Dinas Sosial Dalam Penyaluran Bantuan Sosial Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan Di Provinsi Lampung
- Yulianton, H., Santi, RCN, Hadiono, K., & Mulyani, S. (2018). Implementasi blockchain yang sederhana.
- Zein, S. Z., Yasyifa, L. Y., Khozi, R. G., Harahap, E., Badruzzaman, F. H., & Darmawan, D. (2019). Pengolahan dan Analisis Data Kuantitatif Menggunakan Aplikasi SPSS. *Teknologi Pembelajaran*, 4(2).